KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6777-9639-0087-5667

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526772/2017

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3. Provinsi	:	(19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(526772)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
Sebesar	:	Rp. 43.400.000	(EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04	PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		Jumlah Uang	
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Rp.	43.400.000
005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.	43.400.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	43.400.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 43.400.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2017
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6777-9639-0087-5667

Kementerian Negara/Lembaga	: (005)	MAHKAMAH AGUNG	Kuasa Pengguna Anggaran	:	SRI MULIATI, S.Sos., MH
Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	Bendahara Pengeluaran	:	LISA LUSIANA FARIDA, SH
Provinsi	: (19)	SULAWESI SELATAN	Pejabat Penanda Tangan SPM	:	ARYANTO
Kode/Nama Satker	: (526772)	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG			

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			43.400.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			43.400.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)			43.400.000
Hasil (Outcome)	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN			
IKU Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana dan Tepat Waktu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN			
	02	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan TUN			
	03	Prosentase Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK, Grasi, Sengketa Pajak dan Hak Uji Materiil di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN			
	04	Terselenggaranya Pelayanan Peradilan TUN			
Kegiatan	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			43.400.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN			
	002	Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
	003	Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN			
	004	Tenaga Teknis Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Administrasi			
	005	Pedoman Tenaga Teknis dan Administrasi di Lingkungan Peradilan TUN yang di susun			
	006	Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan			
	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan TUN			
Keluaran (Output)	1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	87,00	Perkara	20.000.000
	1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikam Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2,00	Perkara	1.200.000
	1059.003	Pos Bantuan Hukum	192,00	Jam Layanan	22.200.000

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.

MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2017

DS:6777-9639-0087-5667

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

			Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2017	Rp.	43.400.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	43.400.000	(2) RPLN	US$ 0	Rp. 0
2. PNBP	Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN	US$ 0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2017
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:6777-9639-0087-5667

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526772	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG**	**-**	**43.400**	**-**	**-**	**-**	**43.400**		
005.05.09	**Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)**	**-**	**43.400**	**-**	**-**	**-**	**43.400**		
1059	**Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara**	**-**	**43.400**	**-**	**-**	**-**	**43.400**		
1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	-	20.000	-	-	-	20.000	19 . 51	
01	RM	-	20.000	-	-	-	20.000	136	
1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikam Melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	1.200	-	-	-	1.200	19 . 51	
01	RM	-	1.200	-	-	-	1.200	136	
1059.003	Pos Bantuan Hukum	-	22.200	-	-	-	22.200	19 . 51	
01	RM	-	22.200	-	-	-	22.200	136	
	JUMLAH	**-**	**43.400**	**-**	**-**	**-**	**43.400**		

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2017
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6777-9639-0087-5667

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode/Nama Satker : (526772) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**526772**	**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	399	885	1.554	2.378	2.500	2.778	4.822	4.692	5.086	5.191	5.811	7.304	43.400
		52 BELANJA BARANG	399	885	1.554	2.378	2.500	2.778	4.822	4.692	5.086	5.191	5.811	7.304	43.400
	005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	399	885	1.554	2.378	2.500	2.778	4.822	4.692	5.086	5.191	5.811	7.304	43.400
		52 BELANJA BARANG	399	885	1.554	2.378	2.500	2.778	4.822	4.692	5.086	5.191	5.811	7.304	43.400
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.201	14.500
		- PNBP (423412)	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500
		- PNBP (423413)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
		- PNBP (423415)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5.000
		- PNBP (423419)	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	413	5.000

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
30395

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526772/2017
IV. C A T A T A N

DS:6777-9639-0087-5667

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [526772] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 07 Desember 2016
Direktur Jenderal Badimiltun

ttd.
MULYONO, S.H., S.IP., M.H.
30395